

BAB IV

KESIMPULAN

Sejak berakhirnya Perang Dingin isu-isu keamanan non-tradisional telah menjadi masalah utama dalam sistem politik internasional. Isu-isu keamanan tradisional memang masih menjadi masalah hingga kini, namun demikian isu keamanan non-tradisional ternyata dapat mempengaruhi keamanan suatu negara atau wilayah baik secara langsung maupun tidak langsung. Isu-isu non-tradisional antara lain mencakup masalah-masalah, seperti; lingkungan, kemiskinan, populasi, migrasi, terorisme, intervensi kemanusiaan, kejahatan yang terorganisir dan konflik internal.

Sebagian besar konflik tajam saat ini bukanlah perang antar negara yang saling bersaing seperti di masa lalu, tetapi terjadi di dalam negara itu sendiri. Banyak di antaranya yang bercampur-baur dengan konsep-konsep identitas, bangsa, dan nasionalisme, serta kebanyakan berakar pada persaingan untuk memperebutkan sumber daya, pengakuan dan kekuasaan. Meskipun konflik-konflik itu tampak berbeda satu sama lain pada dasarnya ada kesamaan isu kebutuhan yang tak terpenuhi, dan pentingnya mengakomodir kepentingan mayoritas dan minoritas.

Konflik sekarang ini merupakan campuran dari berbagai penyebab yang rumit. Akar penyebabnya secara esensial kemungkinan adalah internal, tetapi menjadi ruwet karena terlibatnya masalah penyeberangan batas, baik oleh negara atau kepentingan ekonomi, serta keterlibatan pelaku non-negara. Konflik-konflik yang terjadi di Afrika sekarang ini menunjukkan campuran penyebab yang sangat parah, berupa pertikaian sipil dan ekspor illegal sumber-sumber daya alam yang mendorong pembelian senjata. Disamping itu, konsekuensi-konsekuensi dari konflik bisa dengan cepat menjadi konflik internasional karena adanya arus senjata illegal, terorisme, perdagangan gelap narkoba, mengalirnya para pengungsi dan rusaknya lingkungan.

Isu-isu seperti masalah kemiskinan, kejahatan yang terorganisir dan konflik internal, juga terjadi di Afrika Barat, dimana semua isu-isu keamanan tradisional tersebut saling berhubungan satu sama lainnya. Pada umumnya,

negara-negara di Afrika Barat memiliki pemerintahan yang lemah karena mereka sebenarnya tidak memiliki kesiapan politik, sosial, dan ekonomi untuk memimpin negaranya, sehingga pada akhirnya hal ini berdampak pada ketidakmampuan mereka untuk menjalankan pemerintahan dengan baik dan mengatasi berbagai pemberontak. Hal inilah pula yang terjadi di Sierra Leone.

Keberadaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, di antaranya, adalah karena tujuan mempertahankan perdamaian dan keamanan di dunia. Karenanya, salah satu kegiatan utamanya adalah penyelesaian konflik – suatu tugas yang dewasa ini menjadi semakin rumit sejak sebagian besar konflik menjadi konflik internal faksional atau perlawanan sipil, walaupun seringkali mempunyai akibat eksternal yang sangat serius. Ketegangan, konflik, maupun perang, memang merupakan suatu gejala yang selalu terjadi dalam percaturan masyarakat internasional dan tidak ada satu negara pun yang dapat mengatasi hal tersebut secara sekaligus. Adanya kenyataan itulah, maka didirikan PBB untuk menghindari makin meningkatnya ketegangan menjadi berbagai macam konflik dan berangsur-angsur mencapai upaya perdamaian.

Operasi perdamaian PBB merupakan suatu alternatif mekanisme PBB dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia. Operasi perdamaian PBB bukan didirikan untuk menghapus semua perbedaan pandangan antara pihak-pihak yang terlibat konflik. Secara esensial, operasi perdamaian PBB dilakukan untuk menjamin agar perbedaan pandangan tersebut tidak menghambat usaha bersama untuk mencapai sasaran yang disepakati. Operasi perdamaian PBB dilakukan dengan maksud untuk mencegah timbulnya situasi yang semakin buruk dalam suatu konflik. Namun demikian, penyelesaian sengketa secara politis dibalik konflik tersebut, bukan merupakan wewenang pasukan perdamaian.

PBB awalnya telah menjadi fasilitator negosiasi pada saat terjadi konflik antar pemerintahan Sierra Leone dengan RUF. PBB sebagai organisasi internasional pada awalnya merespon permintaan pemerintah Sierra Leone untuk membantu memfasilitasi negosiasi antara pemerintahan Sierra Leone dengan RUF melalui misi eksploratif untuk menganalisis konflik tersebut. Ditunjuknya utusan khusus PBB dari Ethiopia, Berhanu Dinka, merupakan suatu usaha PBB dalam perannya sebagai inisiator, fasilitator dan mediator bagi pihak-pihak yang bertikai agar dapat duduk bersama untuk menegosiasikan perjanjian

dengan tujuan untuk mencapai suatu kesepakatan damai. Hasil dari peran diplomasi dan mediasi PBB, awalnya dapat dilihat dari diadakannya Pemilu Sierra Leone pada Februari 1996. Peran diplomasi dan mediasi PBB yang dilakukan untuk menengahi pihak-pihak yang bertikai, memiliki efek yang cukup signifikan sebagai langkah awal untuk memulihkan perdamaian di Sierra Leone. Peranan diplomasi dan mediasi yang dilakukan PBB dilakukan untuk mencegah pertikaian supaya tidak memuncak menjadi konflik.

Meskipun pada awalnya usaha negosiasi yang dilakukan oleh PBB belum berhasil menciptakan perjanjian damai antara kedua belah pihak yang bertikai tersebut, namun PBB tetap mengusahakan cara lain untuk mewujudkan perdamaian, yakni dengan melakukan penempatan para pengawas perdamaian di lapangan untuk menahan konflik dan melakukan pelucutan serta penghancuran terhadap senjata untuk mencegah pemanfaatannya dalam peperangan di kemudian hari. Dalam usahanya tersebut, PBB mendapat bantuan keamanan dari organisasi regional yaitu ECOWAS, melalui pasukan ECOMOG. Dalam hal ini, organisasi regional memiliki peran yang penting dalam operasi perdamaian mengingat kedekatan wilayah dengan daerah konflik, sehingga memiliki kekhawatiran yang besar terhadap situasi yang terjadi dan akan berusaha untuk mencegah penyebaran konflik yang dapat membahayakan keseluruhan kawasan.

Melalui mandatnya terhadap UNOMSIL, PBB dapat dikatakan membantu dalam hal pengawasan gencatan senjata dan membantu para pihak yang bertikai untuk dapat menyelesaikan konflik melalui meja perundingan. Dan pada akhirnya peran PBB dapat dikatakan lebih sukses lagi melalui misi barunya membentuk UNAMSIL yang melanjutkan peran UNOMSIL dalam menjalankan mandat DK PBB.

Pada mulanya memang usaha UNAMSIL dalam menjalankan tugasnya belum sepenuhnya dapat dikatakan berhasil terutama dalam pengelolaan hasil pelucutan senjata di Sierra Leone. Hal tersebut dikarenakan adanya dalih Presiden Kabbah yang tidak menghancurkan sejumlah hasil pelucutan senjata yg dilakukan oleh UNAMSIL, namun dipergunakan untuk perlengkapan militer dan polisi Sierra Leone. Namun hal tersebut tidak berpengaruh besar terhadap usaha PBB untuk mengalahkan pemberontak RUF di negara tersebut.

Pada akhirnya DK PBB terus meningkatkan kekuatan UNAMSIL dengan menambah jumlah pasukannya. Keberhasilan UNAMSIL dapat dilihat dari tertangkapnya pemimpin kelompok RUF, Foday Sankoh serta berhasil membebaskan separuh dari sandera yg ditangkap RUF. UNAMSIL pun berhasil melakukan pelucutan demi pelucutan senjata di Sierra Leone hingga pada akhirnya kondisi pun dapat dikatakan relatif stabil. Seluruh sandera pun pada akhirnya semua berhasil dibebaskan oleh UNAMSIL. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa ternyata UNAMSIL mampu menjalankan salah satu mandatnya yakni melindungi warga sipil yang berada dalam ancaman kekerasan fisik. UNAMSIL juga telah membantu mengadakan pemilu guna membangun kembali kekuatan polisi lokal negara tersebut dan juga berkontribusi dalam merehabilitasi infrastruktur serta memberikan rakyat setempat bantuan-bantuan dari pemerintah.

Melalui UNAMSIL, PBB juga telah membantu pemerintah Sierra Leone untuk menghentikan perdagangan ilegal berlian dan mengatur industri perdagangan di negara tersebut. UNAMSIL juga telah membantu dalam hal pengawasan serta pelatihan terhadap penduduk Sierra Leone, yang berkaitan dengan HAM, khususnya dalam menyediakan instrumen-instrumen untuk merancang Pengadilan Khusus terhadap Sierra Leone guna mengadili pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan kejahatan perang. Dan akhirnya pada tahun 2002 UNAMSIL berhasil melakukan pelucutan senjata serta demobilisasi terhadap 75.000 mantan pasukan pemberontak dan pemerintah pun mendeklarasikan bahwa perang di negara tersebut dinyatakan berakhir dan kekuasaan pemerintahan Sierra Leone pun telah dikembalikan.

Tidak hanya sampai disitu, PBB juga masih terus memberikan bantuan-bantuan lain seperti berusaha menyediakan lapangan pekerjaan bagi beribu-ribu pengangguran di negara tersebut, menyediakan layanan umum bagi masyarakat lokal juga merekonstruksi sekolah-sekolah, klinik-klinik, mendanai proyek-proyek pertanian serta mensponsori klinik kesehatan gratis.

Dari penjelasan-penjelasan diatas dapat dilihat bahwa melalui operasi perdamaian yang dilakukan PBB, keberhasilan yang telah dicapainya serta peran lain yang telah ditunjukkannya ini membuktikan bahwa PBB sebagai organisasi internasional telah menunjukkan posisinya sebagai aktor tunggal

yang independen dalam melaksanakan perannya sebagai inisiator, fasilitator dan mediator khususnya di Sierra Leone.

Pencapaian PBB dalam hal bantuan penjagaan perdamaian, bantuan kemanusiaan dan proses pemulihan, selama ini dapat dikatakan cukup berhasil. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan dibentuknya UNIOSIL yang merupakan pusat dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peran *Peacebuilding* dimana seluruh unsur PBB seperti agensi-agensi, donasi dan programnya untuk bekerja secara bersama-sama demi terwujudnya peningkatan kualitas hidup dari rakyat Sierra Leone melalui pembangunan di segala bidang kehidupan (ekonomi, sosial dan infrastruktur), pembangunan pemerintahan yang demokratis dan transparan, jaminan keamanan dan sebagainya.

Namun demikian, misi PBB belum dapat dikatakan selesai sampai disitu saja karena pada kenyataannya masih ada masalah-masalah lain yang belum terselesaikan dengan tuntas di negara tersebut. Oleh karena itu langkah-langkah selanjutnya yang harus dilakukan, antara lain adalah:

1. Berkaitan dengan peran *peacebuilding*, PBB harus tetap mengupayakan restrukturisasi berbagai infrastruktur di Sierra Leone dan tetap mengupayakan adanya penghormatan terhadap budaya HAM di negara tersebut dengan membentuk misi baru lainnya.
2. PBB harus tetap mengencarkan dan mengawasi program pelucutan senjata, dengan maksud agar masyarakat sipil sama sekali tidak memegang senjata. Hal ini dikarenakan program pelucutan senjata sudah terbukti dapat menekan proliferasi senjata kecil dan ringan, sehingga tanpa adanya senjata, kelompok-kelompok pemberontak tidak dapat melakukan kejahatan dan aksi kekerasan.
3. PBB harus tetap meningkatkan kerjasama dengan organisasi regional dan LSM, karena peran mereka ini sudah terbukti membantu PBB dalam memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.

Selain itu, mengingat bahwa peran PBB belum selesai sampai disitu, untuk penelitian-penelitian selanjutnya, langkah-langkah yang harus dilakukan, antara lain adalah:

1. Mendapatkan data yang lebih banyak dan aktual mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan PBB dalam proses pemulihan perdamaian dan keamanan di Sierra Leone.
2. Membahas mengenai peran *peacebuilding* PBB dalam upaya merestrukturisasi berbagai infrastruktur di Sierra Leone termasuk penghormatan terhadap budaya HAM di negara tersebut, melalui misi PBB selanjutnya yaitu UNIOSIL (*United Nations Integrated Office in Sierra Leone*).

